PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP DISPARITAS ANTARWILAYAH DI KALIMANTAN BARAT

TUGAS AKHIR

Untuk Memenuhi Prasyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

MUHAMMAD HAIKAL
NIM. B1011221098

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
2026

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Muhammmad Haikal
NIM	:	B1011221098
Jurusan	:	IESP
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Proposal / TA	:	Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Disparitas Antarwilayah di Kalimantan Barat.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa ~~Proposal~~ / Tugas Akhir (TA)* dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan ~~Proposal~~ / Tugas Akhir (TA)* dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 22 Juli 2026



(Muhammad Haikal)
NIM. B1011221098

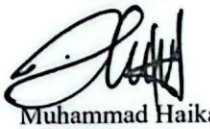
PERTANGGUNG JAWABAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Haikal
NIM	: B1011221098
Jurusan	: Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan
Judul Proposal/TA	: Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Disparitas Antarwilayah di Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Pontianak, 22 Juli 2026



Muhammad Haikal
NIM B1011221098

LEMBAR YURIDIS

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP DISPARITAS ANTARWILAYAH DI KALIMANTAN BARAT

Penanggung Jawab Yuridis

Muhammad Haikal
B1011221098

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA) : 24 Juni 2026

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing Utama	Dr. Yarlina Yacoub, SE., MSi.	7/7/26	
		NIP 196211201989032003		
2.	Ketua Penguji	Dr. Windhu Putra, S.E., M.Si.	8/7/26	
		NIP 196404281989031004		
3.	Anggota Penguji	Faishol Luthfi, S.E., M.SEI.	7/7/26	
		NIP 199307212022031012		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

Pontianak, 22 JUL 2026
Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan

Yanto, S.E., M.Sc.
NIP 197706152003121004

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas ke hadirat Allah SWT. Karena atas rahmat, karunia serta hidayah-Nya lah. Penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul, **"PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP DISPARITAS ANTARWILAYAH DI KALIMANTAN BARAT"** secara baik dan lancar. Shalawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada junjungkan kita yaitu, Rasulullah SAW. Penyusunan Tugas Akhir ini merupakan salah satu rekam jejak perjalanan hidup, tuntutan, proses pendewasaan diri, serta makna yang berarti. Dari penulis menyadari bahwa penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari usaha dan kerja keras pribadi, serta tidak lepas dari kehendak dan pertolongan Allah SWT yang menghadirkan berbagai pihak untuk memberikan bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa selama proses penyusunan Tugas Akhir.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan, bantuan, serta doa selama proses penyelesaian Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati dan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak, yang telah memberikan berbagai kemudahan, dukungan, serta fasilitas yang memungkinkan penulis untuk menempuh dan menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
2. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak
3. Bapak Yanto, S.E., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Yarlina Yacoub, S.E., M.Si. Sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir, yang telah memberikan arahan serta pemahaman secara tulus selama penulisan sehingga penulis bisa menyelesaikan ini secara baik dan optimal.
5. Bapak Dr. Windhu Putra, S.E., M.Si. Selaku Ketua penguji sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah memberikan saran, masukan, nasihat, arahan, serta kritik yang membangun demi penulisan tugas akhir.
6. Bapak Faishol Luthfi, S.E., M.SEI. Selaku Tim penguji sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah memberikan semangat, pandangan, serta penulisan yang tepat untuk melengkapi tugas akhir ini.
7. Seluruh Staf Akademik, Perpustakaan, dan Tata Usaha serta seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Tanjungpura yang telah memberikan bantuan, pelayanan, serta kemudahan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan hingga selesainya penyusunan tugas akhir ini.
8. Kepada kedua pahlawan sekaligus saksi hidup yang penulis cintai, yaitu Bapak Bambang Prastiawan dan Ibu Wizastuti. Terima kasih atas segala upaya, dukungan moril, doa, dan kasih sayang yang senantiasa diberikan tanpa pamrih. Terima kasih telah menjadi sosok orang tua yang selalu menemani setiap proses tumbuh dan perjalanan hidup penulis hingga saat ini. Setiap pencapaian yang diraih penulis tidak terlepas dari doa yang tidak pernah berhenti, serta pengorbanan yang telah diberikan demi masa depan penulis. Penulis berharap Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, umur yang panjang, serta kelancaran rezeki sepanjang kehidupan. Jika suatu saat penulis diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan dan lini waktu yang berbeda, penulis berharap Bapak dan Ibu tetap memilih untuk menjadi orang tua penulis.

9. Kakak dan adik penulis sayangi, yaitu Ridha Mardhatillah, Ajeng Lestari, dan Yasmin Khairunnisa yang telah memberikan dukungan, asa dan kasih selama proses penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih atas keikhlasan, canda tawa, dan doa yang telah diberikan kepada penulis. Sebagai adik dan abang, penulis merasa sangat beruntung memiliki adik dan kakak yang selalu hadir memberikan semangat, menjadi tempat untuk berbagi cerita, serta mengingatkan penulis agar tetap kuat dan percaya pada kemampuannya. Dukungan tersebut sangat berperan sebagai sumber motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Keluarga baru yang hadir di kehidupan penulis, Danny Pranata dan Luthfia Aqilatunnisa yang telah menjadi bagian dari keluarga baru penulis dan selalu memberikan dukungan serta kehangatan dalam kebersamaan. Terima kasih juga telah menjadi keponakan penulis yang lucu, menggemaskan, dan selalu berhasil menghadirkan keceriaan dengan tingkah polos. Kehadiran kalian membuat suasana keluarga terasa lebih hangat dan menyenangkan. Semoga kebersamaan, kasih sayang, dan canda tawa ini selalu menjadi bagian indah dalam kehidupan penulis.
11. Terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, dan perhatian selama penulis menempuh pendidikan hingga menyelesaikan tugas akhir ini. Setiap dukungan dan motivasi yang diberikan menjadi bagian penting dalam membantu penulis melewati berbagai proses dan tantangan selama masa pendidikan. Kehadiran keluarga besar juga menjadi sumber kekuatan bagi penulis untuk terus berusaha dan menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga segala kebaikan, doa, dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik serta senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan.
12. Terima kasih kepada Muhammad Raihan dan Faaza Fauzan, sahabat penulis hingga saat ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari begitu banyak cerita, tawa, perjuangan, dan perjalanan hidup penulis. Dari masa ke masa hingga saat ini, banyak hal telah berubah, tetapi hubungan ini tetap bertahan. Terima kasih karena selalu hadir, menjadi tempat berbagi cerita, dan menemani penulis melewati berbagai fase kehidupan. Semoga persahabatan ini tetap terjaga dan menjadi salah satu hubungan yang selalu penulis syukuri.
13. Terima kasih kepada sahabat-sahabat MTsN yang hingga saat ini masih menjadi sahabat dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, canda tawa, dan cerita yang telah dilalui bersama sejak masa MTsN hingga sekarang. Meskipun waktu terus berjalan dan kehidupan membawa kita pada kesibukan masing-masing, persahabatan ini tetap menjadi bagian yang berharga bagi penulis. Terima kasih karena tetap hadir dan menjadi tempat berbagi dalam berbagai keadaan.
14. Terima kasih penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat selama masa perkuliahan, Jason, Rico, Mustafa, Netanel, Hero, Anang, Ikbal, Zainul, Nanda, Raihan, Aldi, Rizqi, Eric, Naya, Dinda, Putri, Eka, April, Maya, dan Puan serta yang tidak bisa disebut satu per satu. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang penulis selama menempuh pendidikan. Banyak hal yang telah kita lalui bersama, mulai dari tugas, kesibukan perkuliahan, berbagai persoalan, hingga canda dan tawa yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan. Kehadiran kalian tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan perkuliahan, tetapi juga menjadi tempat berbagi cerita, bertukar pikiran, saling membantu, dan saling menguatkan ketika menghadapi masa-masa sulit. Setiap kebersamaan yang terjalin menjadi kenangan yang akan selalu penulis ingat sebagai salah satu bagian penting dalam perjalanan menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih kepada semua sahabat dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Setiap bantuan, perhatian, waktu, dan kebaikan yang telah diberikan memiliki arti tersendiri bagi penulis. Semoga setelah perjalanan ini selesai, hubungan yang telah terjalin tetap terjaga

meskipun masing-masing akan menempuh jalan dan kehidupan yang berbeda. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan terbaik dari-Nya.

15. Terima kasih kepada diri sendiri yang telah bertahan dan terus melangkah hingga sampai pada titik ini. Terima kasih karena tetap berusaha ketika perjalanan terasa berat, tetap menyelesaikan apa yang telah dimulai, dan tidak menyerah meskipun banyak hal yang membuat penulis merasa lelah, ragu, bahkan ingin berhenti. Terima kasih telah melewati berbagai proses, tekanan, kegagalan, kekhawatiran, serta hari-hari yang tidak selalu mudah selama menempuh pendidikan. Setiap rasa lelah, waktu yang dikorbankan, air mata, dan usaha yang mungkin tidak selalu terlihat oleh orang lain menjadi bagian dari perjalanan yang akhirnya membawa penulis sampai pada penyelesaian tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa perjalanan ini tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan, tetapi diri ini telah belajar untuk menerima, memperbaiki, dan kembali melangkah setiap kali menghadapi kesulitan. Terima kasih karena telah memilih untuk bertahan hingga akhir dan memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk menyelesaikan apa yang telah diperjuangkan selama ini. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bagi penulis bahwa setiap proses memiliki arti dan bahwa setiap perjuangan yang telah dilalui layak untuk dihargai. Semoga setelah ini penulis mampu terus melangkah dengan lebih kuat, tetap rendah hati, dan tidak pernah melupakan perjuangan yang telah mengantarkan penulis sampai pada titik ini.

Sebagai penutup, penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Penulis juga berharap karya ini dapat menjadi salah satu bahan rujukan yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

Pontianak, 22 Juli 2026

Muhammad Haikal
NIM B1011221098

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP DISPARITAS ANTARWILAYAH DI KALIMANTAN BARAT

[1]Muhammad Haikal
Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of fiscal decentralization and the Human Development Index on interregional disparities among regencies/cities in West Kalimantan Province during the 2015–2024 period. This study employs a quantitative approach using secondary data obtained from Statistics Indonesia and the Directorate General of Fiscal Balance. Interregional disparity is measured using the Williamson Index, fiscal decentralization is proxied by the fiscal independence ratio, while human development quality is measured using the Human Development Index (HDI). The analytical method used is panel data regression with the Fixed Effect Model (FEM) approach and supported by Klassen Typology analysis. The results indicate that fiscal decentralization has no significant effect on interregional disparities, while the Human Development Index has a positive and significant effect on interregional disparities. This study concludes that interregional disparities in West Kalimantan Province are more influenced by structural factors, particularly the quality of human resources and the concentration of economic activities, rather than regional fiscal capacity.
***Keywords**: Interregional Disparity, Fiscal Decentralization, Human Development Index, Williamson Index, Klassen Typology.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap disparitas antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat periode 2015–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Disparitas antarwilayah diukur menggunakan Indeks Williamson, desentralisasi fiskal diproksikan melalui rasio kemandirian fiskal, sedangkan kualitas pembangunan manusia diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) dan didukung oleh analisis Tipologi Klassen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas antarwilayah, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas antarwilayah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa disparitas antarwilayah di Provinsi Kalimantan Barat lebih dipengaruhi oleh faktor struktural, khususnya kualitas sumber daya manusia dan konsentrasi aktivitas ekonomi dibandingkan kapasitas fiskal daerah.
Kata Kunci: Disparitas Antarwilayah, Desentralisasi Fiskal, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Williamson, Tipologi Klassen.

[1]b1011221098@student.untan.ac.id

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP DISPARITAS ANTARWILAYAH DI KALIMANTAN BARAT

RINGKASAN

1. Latar Belakang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya disparitas antarwilayah di Provinsi Kalimantan Barat yang ditunjukkan melalui perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota. Ketimpangan tersebut tercermin dari perkembangan Indeks Williamson yang cenderung mengalami peningkatan setelah tahun 2020 sehingga menunjukkan bahwa proses pembangunan antarwilayah belum berlangsung secara merata. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbedaan kapasitas ekonomi, infrastruktur, dan kemampuan pembangunan antar daerah. Implementasi desentralisasi fiskal diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya dan kualitas pelayanan publik melalui pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah. Namun, perbedaan kapasitas fiskal antar daerah menyebabkan manfaat kebijakan tersebut belum berlangsung secara merata. Di sisi lain, kualitas pembangunan manusia antarwilayah juga masih menunjukkan perbedaan yang cukup nyata, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa disparitas antarwilayah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor fiskal, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pembangunan manusia dan struktur pembangunan wilayah.

2. Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada masih terjadinya disparitas antarwilayah di Provinsi Kalimantan Barat meskipun pelaksanaan desentralisasi fiskal dan peningkatan pembangunan manusia terus dilakukan. Perbedaan kapasitas fiskal daerah serta kualitas pembangunan manusia diduga berkontribusi terhadap variasi disparitas antarwilayah. Oleh karena itu, penelitian ini menguji pengaruh desentralisasi fiskal yang diproksikan melalui rasio kemandirian fiskal serta Indeks Pembangunan Manusia terhadap disparitas antarwilayah Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji pengaruh desentralisasi fiskal dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap disparitas antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat periode 2015–2024 serta menganalisis struktur pembangunan wilayah melalui pendekatan Tipologi Klassen.

3. Tujuan Penelitian

1. Apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap disparitas antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat periode 2015–2024?
2. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap disparitas antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat periode 2015–2024?
3. Apakah ada terdapat pola struktur pembangunan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan pendekatan Tipologi Klassen selama periode 2015–2024?

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Data penelitian mencakup 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2015–2024. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Variabel desentralisasi fiskal diproksikan menggunakan rasio kemandirian fiskal, sedangkan disparitas antarwilayah diukur menggunakan Indeks Williamson. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis Tipologi Klassen untuk melihat struktur pembangunan wilayah.

5. Hasil Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas antarwilayah di Provinsi Kalimantan Barat periode 2015–2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa variasi kapasitas fiskal daerah yang diproksikan melalui rasio kemandirian fiskal belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap disparitas antarwilayah. Temuan ini menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan fiskal belum diikuti oleh kapasitas fiskal yang relatif merata antar kabupaten/kota sehingga efektivitas desentralisasi fiskal dalam mempengaruhi disparitas belum terlihat secara signifikan. Hasil Tipologi Klassen juga menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat masih berada pada kategori berkembang dan tertinggal, sedangkan wilayah maju relatif terkonsentrasi pada daerah dengan kapasitas ekonomi yang lebih kuat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa disparitas pembangunan di Kalimantan Barat lebih dipengaruhi oleh faktor struktural, khususnya kualitas sumber daya manusia dan konsentrasi aktivitas ekonomi dibandingkan kapasitas fiskal daerah.

6. Kesimpulan dan Rekomendasi

Penelitian ini menyimpulkan bahwa disparitas antarwilayah di Provinsi Kalimantan Barat masih dipengaruhi oleh ketimpangan kualitas pembangunan manusia dan struktur ekonomi antar daerah. Desentralisasi fiskal belum mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan disparitas wilayah karena peningkatan kapasitas fiskal daerah belum berlangsung secara merata. Sementara itu, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia justru berpengaruh signifikan terhadap disparitas antarwilayah akibat masih terpusatnya kualitas pembangunan manusia pada wilayah tertentu. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memfokuskan kebijakan pada pemerataan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, penguatan infrastruktur dasar, serta peningkatan kapasitas ekonomi daerah tertinggal agar pembangunan antarwilayah dapat berlangsung lebih merata dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL ix
1. PENDAHULUAN 1
2. KAJIAN LITERATUR 7
2.1 Tinjauan Teori 7
2.1.1 Disparitas Antarwilayah 7
2.1.2 Desentralisasi Fiskal 8
2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia 9
2.1.4 Teori *Fiscal Federalism* 9
2.1.5 Teori *Cumulative Causation* 10
2.1.6 Teori Modal Manusia 11
2.1.7 Analisis *Klassen Typology* pada Struktur wilayah 11
2.2 Tinjauan Empiris 11
2.3 Kerangka Konseptual 13
2.4 Pengaruh Antar Variabel dan Hipotesis 13
2.4.1 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Disparitas Antarwilyah 13
2.4.2 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Disparitas Antarwilayah 13
2.4.3 Pengaruh Simultan antara Desentralisasi Fiskal dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Disparitas Antarwilayah 14
3. METODE PENELITIAN 14
3.1 Bentuk, Tempat dan Waktu Penelitian 14
3.2 Jenis dan Sumber data 14
3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 15
3.4 Metode Analisis Data 16
3.4.1 Analisis Regresi Data Panel 16
3.5 Uji Spesifikasi Model *Generalized Least Squares* (GLS) 16
3.6 Uji Penentuan Model Estimasi 16
3.7 Uji Asumsi Klasik 17
3.8 Uji Statistik 18
3.9 Analisis Tipologi Klassen 18
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 19
4.1 Hasil Penelitian 19
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 19
4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif 23
4.1.3 Analisis Struktur Wilayah (Tipologi Klassen) 25
4.1.4 Analisis Perbandingan 2020 dan 2024 27
4.1.5 Pemilihan Model Regresi 28
4.1.6 Hasil Estimasi Regresi Data Panel 28
4.1.7 Uji Asumsi Klasik 30
4.1.8 Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 31
4.2 Pembahasan 32
4.2.1 Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Disparitas Antarwilayah 32
4.2.2 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Disparitas Antarwilayah 33

4.2.3 Struktur Wilayah dan Hasil Regresi.....33
5. PENUTUP 34
5.1 Kesimpulan 34
5.2 Saran 35
DAFTAR RUJUKAN.....36
LAMPIRAN 1.....39

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rata-Rata Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015–2024 ...2
Tabel 1. 2 Rata-Rata Rasio Kemandirian Fiskal Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2024 3
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel 15
Tabel 4. 1 Rata-Rata Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015–2024 .20
Tabel 4. 2 Rata-Rata Rasio Kemandirian Fiskal Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2024 20
Tabel 4. 3 Statistik Deskriptif 24
Tabel 4. 4 Hasil Uji Chow.....28
Tabel 4. 5 Hasil Uji Hausman 28
Tabel 4. 6 Hasil Estimasi Regresi Fixed Effect Model (FEM) 28
Tabel 4. 7 Hasil Uji Normalitas.....30
Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolinearitas 30
Tabel 4. 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....30
Tabel 4. 10 Hasil Uji Simultan (Uji F) 31
Tabel 4. 11 Hasil Uji Parsial (Uji t).....31
Tabel 4. 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Rata-Rata Nilai Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015–2024 5
Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual 13
Gambar 4. 1 Rata-Rata Nilai Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015–2024 22
Gambar 4. 2 Tipologi Klassen Kab/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020.....25
Gambar 4. 3 Tipologi Klassen Kab/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024.....26

1. PENDAHULUAN

Disparitas antarwilayah masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat. Meskipun wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam dan sosial yang besar, distribusi hasil pembangunan belum merata antar kabupaten/kota. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan dan pembangunan secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan melalui pengelolaan sumber daya yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun (2018) menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan antarwilayah masih menjadi permasalahan utama yang menghambat pembangunan nasional serta berpotensi memengaruhi stabilitas sosial dan kohesi ekonomi. Puspita (2021) menyatakan bahwa kedua aturan tersebut menandai dimulainya era baru otonomi daerah, yang memberikan lebih banyak wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dan mengembangkan daerah secara mandiri.

Implementasi desentralisasi fiskal juga tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas pembangunan manusia secara merata. Daerah dengan kapasitas fiskal yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat Indeks Pembangunan Manusia yang lebih baik, sementara daerah dengan kapasitas fiskal terbatas masih menghadapi kendala dalam akses pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Kondisi ini menunjukkan adanya keterkaitan antara kapasitas fiskal dan kualitas sumber daya manusia dalam menentukan arah pembangunan wilayah.

Dalam konteks Kalimantan Barat, disparitas antarwilayah dapat diamati melalui perkembangan Indeks Williamson selama periode 2015–2024. Indeks ini menunjukkan bahwa ketimpangan antarwilayah masih bersifat persisten, dengan kecenderungan meningkat setelah tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pembangunan belum berjalan secara merata dan masih dipengaruhi oleh perbedaan kemampuan antarwilayah dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi disparitas antarwilayah, khususnya desentralisasi fiskal dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Analisis ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika ketimpangan pembangunan antarwilayah di Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana kapasitas fiskal daerah dan kualitas pembangunan manusia berkontribusi terhadap perbedaan tingkat pembangunan antarwilayah, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, inklusif, dan berorientasi pada pemerataan.

Untuk menggambarkan kondisi disparitas pembangunan secara empiris, penelitian ini menggunakan Indeks Williamson sebagai indikator utama dalam mengukur tingkat ketimpangan antarwilayah. Indeks Williamson dipilih karena mampu menunjukkan besarnya perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota berdasarkan distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dengan mempertimbangkan jumlah penduduk pada masing-masing wilayah. Semakin tinggi nilai Indeks Williamson,

semakin besar tingkat disparitas pembangunan yang terjadi, sedangkan nilai yang semakin rendah menunjukkan kondisi pembangunan yang relatif lebih merata. Oleh karena itu, perkembangan Indeks Williamson selama periode 2015–2024 digunakan sebagai gambaran awal untuk mengidentifikasi pola perubahan disparitas antarwilayah di Provinsi Kalimantan Barat sebelum dilakukan analisis terhadap pengaruh desentralisasi fiskal dan Indeks Pembangunan Manusia. Perkembangan rata-rata Indeks Williamson tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1 Rata-Rata Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015–2024

Tahun	Disparitas Antarwilayah
2015	0,244
2016	0,244
2017	0,244
2018	0,242
2019	0,242
2020	0,250
2021	0,252
2022	0,254
2023	0,253
2024	0,254

Sumber: Data diolah tahun 2026

Berdasarkan rata-rata Indeks Williamson periode 2015–2024, perkembangan disparitas antarwilayah di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan dua karakteristik utama, yaitu kondisi yang relatif stabil pada periode sebelum tahun 2020 dan kecenderungan peningkatan disparitas pada periode setelah tahun 2020. Selama tahun 2015 hingga 2017, nilai Indeks Williamson tercatat konstan sebesar 0,244, yang mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan antarwilayah belum mengalami perubahan yang berarti. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi aktivitas ekonomi dan tingkat pembangunan antar kabupaten/kota masih berada pada pola yang relatif sama, sehingga belum terjadi perubahan struktur pembangunan yang mampu memperkecil maupun memperbesar disparitas secara signifikan. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut cenderung berlangsung secara seimbang antarwilayah, sehingga tingkat kesenjangan regional tetap berada pada kondisi yang relatif stabil.

Pada tahun 2018 dan 2019, indeks menurun menjadi 0,242. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan distribusi ekonomi, meskipun dalam skala terbatas. Kondisi tersebut mengindikasikan awal terjadinya konvergensi wilayah, di mana daerah dengan tingkat pembangunan lebih rendah mulai mengejar daerah yang lebih maju. Namun, tren ini tidak berlangsung lama.

Memasuki tahun 2020, indeks meningkat menjadi 0,250 dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai 0,254 pada tahun 2022. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan disparitas antarwilayah yang cukup signifikan. Perubahan tersebut mencerminkan bahwa guncangan ekonomi memengaruhi daerah secara tidak merata. Wilayah dengan struktur ekonomi yang lebih kuat mampu beradaptasi dan pulih lebih

cepat, sementara daerah dengan kapasitas ekonomi terbatas mengalami tekanan yang lebih besar. Hal ini menyebabkan proses pemulihan ekonomi berlangsung secara tidak seimbang.

Pada tahun 2023, indeks sedikit menurun menjadi 0,253, namun perubahan ini tidak menunjukkan adanya perbaikan struktural yang berarti. Tahun 2024 kembali menunjukkan peningkatan menjadi 0,254, yang menegaskan bahwa disparitas antarwilayah masih bertahan pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelum tahun 2020. Secara keseluruhan, pola ini menunjukkan bahwa disparitas antarwilayah di Kalimantan Barat bersifat persisten dan cenderung meningkat dalam periode pemulihan ekonomi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor struktural, seperti kapasitas fiskal daerah dan distribusi kualitas sumber daya manusia, memiliki peran penting dalam menentukan dinamika ketimpangan wilayah.

Berdasarkan tabel tersebut, perkembangan Indeks Williamson di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa disparitas antarwilayah masih mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses pembangunan ekonomi antar daerah belum berlangsung secara merata.

Perubahan dinamika disparitas tersebut menunjukkan bahwa peningkatan ketimpangan tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor yang memengaruhi kapasitas pembangunan daerah, khususnya desentralisasi fiskal dan kualitas pembangunan manusia. Data rasio kemandirian fiskal kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2015–2024 menunjukkan adanya peningkatan kapasitas keuangan daerah secara umum. Secara agregat, rata-rata rasio meningkat dari sekitar 0,102 pada tahun 2015 menjadi 0,150 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran melalui Pendapatan Asli Daerah mengalami perbaikan, yang mencerminkan adanya penguatan implementasi desentralisasi fiskal.

Tabel 1. 2 Rata-Rata Rasio Kemandirian Fiskal Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2024

Tahun	Desentralisasi Fiskal (%)
2015	10.24
2016	9.42
2017	13.18
2018	11.84
2019	11.94
2020	12.63
2021	12.73
2022	14.22
2023	14.40
2024	15.00

Sumber: Kementerian Keuangan Kalimantan Barat, (2015-2024)

Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata rasio kemandirian fiskal di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2015–2024 menunjukkan tren yang cenderung meningkat, meskipun masih diwarnai fluktuasi pada beberapa tahun tertentu. Dalam penelitian ini, rasio kemandirian fiskal digunakan sebagai proksi desentralisasi fiskal karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif terhadap Pendapatan Transfer.

Pada tahun 2015, rata-rata rasio kemandirian fiskal tercatat sebesar 10,24%, kemudian menurun menjadi 9,42% pada tahun 2016. Kondisi tersebut menunjukkan masih terbatasnya kemampuan fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Pada tahun 2017, rata-rata rasio meningkat menjadi 13,18%, kemudian kembali mengalami fluktuasi hingga akhir periode penelitian. Meskipun demikian, secara keseluruhan terlihat adanya kecenderungan peningkatan kapasitas fiskal daerah, walaupun tingkat kemandirian fiskal antarwilayah masih menunjukkan perbedaan yang cukup nyata.

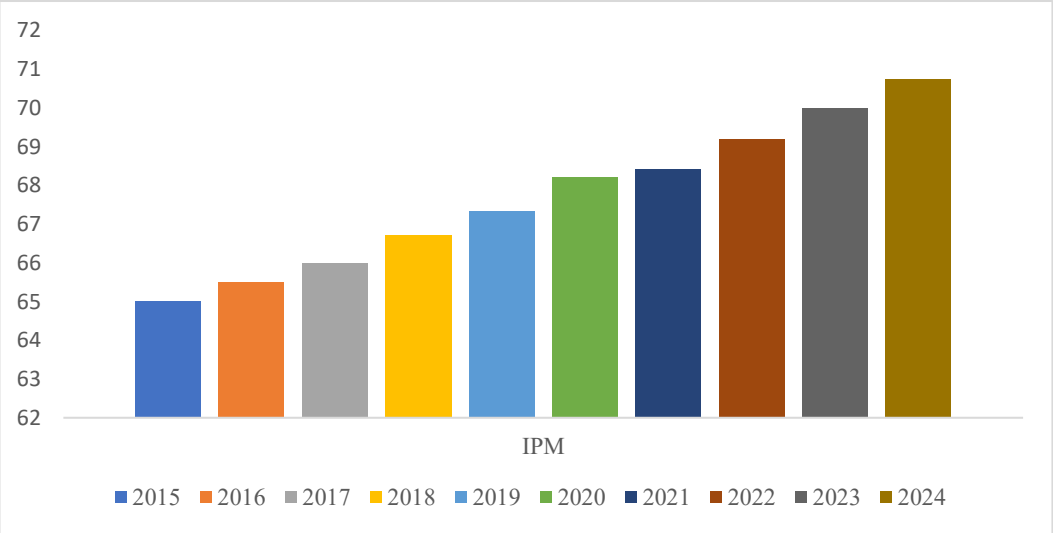
Secara umum, perkembangan desentralisasi fiskal menunjukkan peningkatan. Melalui tren yang berkembang sebesar 15,00% pada tahun 2024, ini dinilai sebagai pencapai tertinggi selama periode penelitian. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah mampu untuk membiayai pembangunan melalui Pendapatan Asli Daerah mengalami perkembangan di periode yang sama. Namun, kapasitas fiskal yang meningkat belum sepenuhnya terjadi secara merata antarwilayah. Wilayah perkotaan seperti kota Pontianak dan Singkawang masih dinilai sebagai tingkat kemandirian fiskal tertinggi dibanding dengan kabupaten lainnya. Artinya, ini terindikasi bahwa fungsi desentralisasi fiskal masih cenderung terpusat pada wilayah dengan kapasitas ekonomi yang jauh lebih kuat.

Selain itu, beberapa daerah seperti Mempawah, Kubu Raya, dan Singkawang menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam rasio kemandirian fiskal. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam pengelolaan pendapatan daerah serta pertumbuhan aktivitas ekonomi lokal. Sebaliknya, daerah seperti Kapuas Hulu mengalami peningkatan yang relatif kecil, yang mencerminkan keterbatasan dalam mengembangkan sumber pendapatan asli daerah. Situasi ini menjadi salah satu alasan yang menjelaskan mengapa desentralisasi fiskal tidak mengubah secara signifikan disparitas antarwilayah dalam hasil analisis regresi (Harsono, 2025).

Fenomena ini sesuai dengan teori akumulasi penyebab yang diajukan oleh Myrdal (1957), yang menyatakan bahwa daerah dengan perkembangan ekonomi yang lebih maju cenderung mengalami kemajuan yang lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang masih tertinggal. Penelitian yang dilakukan oleh (Nurman, 2013) dan Yulitiawati (2017) secara empiris menunjukkan bahwa meskipun kapasitas fiskal daerah meningkat, hal tersebut belum sepenuhnya mampu mencapai pemerataan pembangunan antarwilayah disebabkan oleh masih adanya ketimpangan dalam kemampuan fiskal antar daerah.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah belum tentu diikuti oleh pemerataan pembangunan antarwilayah. Perbedaan kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah serta masih tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer mengindikasikan bahwa efektivitas desentralisasi fiskal masih dipengaruhi oleh karakteristik dan kapasitas ekonomi masing-masing daerah. Oleh karena itu, selain faktor fiskal, diperlukan kajian terhadap faktor lain yang berpotensi memengaruhi disparitas antarwilayah, salah satunya adalah kualitas pembangunan manusia yang tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kualitas pembangunan manusia menjadi aspek yang penting karena berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki setiap daerah. Perbedaan tingkat pembangunan manusia antarwilayah berpotensi memengaruhi kemampuan daerah dalam

menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan mempersempit kesenjangan pembangunan. Dengan demikian, analisis terhadap IPM bersama desentralisasi fiskal menjadi penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi disparitas antarwilayah di Provinsi Kalimantan Barat.



Gambar 2. 1 Rata-Rata Nilai Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015–2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Perkembangan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2015–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten tanpa mengalami penurunan. Nilai IPM meningkat dari sekitar 65,00 pada tahun 2015 menjadi 70,75 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas hidup masyarakat, terutama pada aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli.

Pada periode 2015 hingga 2017, peningkatan IPM berlangsung secara bertahap, yang menunjukkan bahwa perbaikan kualitas sumber daya manusia terjadi secara gradual. Memasuki periode 2018 hingga 2019, laju peningkatan menjadi lebih cepat, yang mengindikasikan adanya penguatan kebijakan pembangunan manusia serta peningkatan efektivitas program sosial. Kondisi ini mencerminkan bahwa investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan mulai memberikan dampak yang lebih signifikan.

Pada tahun 2020, IPM tetap meningkat menjadi 68,20 meskipun terjadi tekanan ekonomi global. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia memiliki karakter yang relatif lebih stabil dibandingkan indikator ekonomi lainnya. Pada tahun 2021, peningkatan masih terjadi namun dengan laju yang lebih lambat, yang mencerminkan adanya dampak lanjutan dari tekanan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pada periode 2022 hingga 2024, IPM kembali meningkat secara lebih kuat hingga mencapai 70,75, yang menunjukkan adanya pemulihan sekaligus penguatan kapasitas pembangunan manusia.

Meskipun menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, perkembangan IPM tidak serta merta mencerminkan pemerataan antarwilayah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia cenderung lebih terkonsentrasi pada wilayah dengan kapasitas ekonomi dan infrastruktur yang lebih baik. Kondisi ini menyebabkan perbedaan kualitas pembangunan

manusia antarwilayah tetap terjadi, sehingga berpotensi memperkuat ketimpangan regional.

Secara keseluruhan, pola ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM di Kalimantan Barat bersifat progresif namun tidak merata. Konsentrasi kualitas sumber daya manusia pada wilayah tertentu memberikan keunggulan kompetitif yang mendorong pertumbuhan lebih cepat dibandingkan wilayah lain. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menjelaskan mengapa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas antarwilayah dalam hasil analisis regresi.

Temuan Asy'ariati (2022) menunjukkan bahwa sebagian besar variasi pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh modal fisik dan kualitas sumber daya manusia. Hal ini menegaskan bahwa pembangunan manusia memiliki peran penting dalam menentukan dinamika pembangunan. Namun, dalam konteks desentralisasi fiskal, peningkatan kapasitas fiskal daerah tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merata. Daerah dengan kemampuan fiskal yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat Indeks Pembangunan Manusia yang lebih baik, sementara daerah dengan kapasitas fiskal terbatas masih menghadapi kendala dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi pembangunan manusia antarwilayah yang berpotensi memperkuat disparitas regional. Meskipun demikian, penelitian yang mengkaji keterkaitan antara desentralisasi fiskal, pembangunan manusia, dan disparitas antarwilayah secara simultan masih terbatas, terutama yang mempertimbangkan struktur pembangunan wilayah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap disparitas antarwilayah di Provinsi Kalimantan Barat dengan pendekatan yang lebih komprehensif.

Namun, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang tidak konsisten. Sari (2025) menemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan, sementara penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda. Selain itu, sebagian besar penelitian belum mengkaji hubungan desentralisasi fiskal, pembangunan manusia, dan disparitas antarwilayah secara simultan. Di sisi lain, penelitian Asrahmaulyana (2023) menunjukkan bahwa IPM justru berpengaruh signifikan dalam mengurangi ketimpangan, namun belum memasukkan aspek kapasitas fiskal daerah sebagai bagian dari analisis. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa hubungan antara pembangunan manusia dan ketimpangan wilayah masih memerlukan pengujian lebih lanjut, khususnya dengan mempertimbangkan peran desentralisasi fiskal.

Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya masih menganalisis variabel-variabel tersebut secara terpisah dan belum mengkaji keterkaitan antara desentralisasi fiskal, Indeks Pembangunan Manusia, dan disparitas antarwilayah secara simultan. Penelitian pada tingkat kabupaten/kota, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, juga masih terbatas. Selain itu, pendekatan yang mempertimbangkan struktur pembangunan wilayah melalui Tipologi Klassen belum banyak digunakan dalam menjelaskan dinamika ketimpangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap disparitas antarwilayah dengan pendekatan yang lebih komprehensif.

Penelitian ini memberikan kontribusi yang berarti baik dalam aspek teori maupun praktik pada kajian pembangunan ekonomi daerah, khususnya mengenai penyebab perbedaan antar wilayah. Dari segi teori, karya ini memperkaya sumber literatur dengan mengabungkan desentralisasi fiskal dan pengembangan manusia dalam satu model analisis data panel di tingkat kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Barat untuk rentang waktu 2015 hingga 2024. Pemakaian rasio kemandirian fiskal sebagai ukuran kapasitas keuangan daerah serta Indeks Pembangunan Manusia sebagai gambaran kualitas sumber daya manusia memberikan wawasan yang lebih lengkap tentang bagaimana faktor fiskal dan nonfiskal mempengaruhi ketidakmerataan pembangunan di berbagai wilayah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan Tipologi Klassen untuk mendeskripsikan struktur pembangunan wilayah, sehingga memberikan perspektif tambahan dalam menjelaskan dinamika disparitas yang tidak sepenuhnya tersampaikan melalui analisis kuantitatif.

Dari sisi praktis, hasil studi ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan. Temuan mengenai keterbatasan pengaruh desentralisasi fiskal serta peranan pembangunan manusia dalam mempengaruhi ketidakmerataan dapat dijadikan dasar untuk meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal daerah, terutama dalam memperkuat kemandirian keuangan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia. Dengan cara ini, penelitian ini menyediakan bukti empiris yang bisa mendukung pembentukan kebijakan pembangunan daerah yang lebih inklusif, terutama dalam upaya mengurangi ketidakmerataan antarwilayah dan meningkatkan kualitas pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat.